

EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN DI KELURAHAN KABONGA BESAR KECAMATAN BANAWA KABUPATEN DONGGALA

Haedar

(Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Tadulako)

Abstract

This research aims at describing, analyzing and interpreting the evaluation of the implementation of National Program for Community Empowerment in Kabonga Besar. This is a qualitative research with descriptive method and the data collection techniques are observations, interviews, and documentations. This research involved 6 informants taken purposively. This research used the model of William Dunn policy evaluation, and it is obtained that the result is not optimal, and the factors which affected, namely: 1) the aspect of effectiveness is not optimal, because there are still problems women's credit refund is not smooth, 2) the aspect of efficiency is good, because the funds disbursed can be utilized as much as possible for the needs of the community, 3) the aspect of adequacy is good, because the program provides benefits to the villagers, 4) the leveling aspect is good, because the program spread to all levels of society, 5) the aspect of responsiveness is good, where the beneficiaries are satisfied with the program existence 5) the aspect of accuracy is good, because the beneficiaries consider that the program is useful for them.

Keywords: *Evaluation, Policy, Community Empowerment*

Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya, tetapi dalam kenyataannya masih adanya kesenjangan sosial yang belum dapat dipecahkan. Salah satu bentuk masalah sosial yang saat ini masih mengemuka di banyak negara sedang berkembang termasuk Indonesia adalah permasalahan kemiskinan. Secara umum kemiskinan ialah satu keadaan dimana seseorang itu kekurangan bahan-bahan keperluan hidup. Dalam masyarakat modern, kemiskinan biasanya diartikan dengan masalah kekurangan uang. Di Indonesia, walaupun usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sudah dilaksanakan melalui kebijakan pembangunan nasional, dan didalamnya juga terdapat program pengentasan kemiskinan, akan tetapi jumlah penduduk yang masuk kategori miskin masih cukup besar. Di Indonesia masalah kemiskinan dirasakan sudah sangat mendesak untuk ditangani, khususnya di wilayah perkotaan dan pedesaan. Salah satu ciri umum

dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh dibawah standar kelayakan, dan mata pencaharian yang tidak menentu.

Pemberdayaan komunitas dilaksanakan dengan menyediakan sumberdaya yang tepat dan menekankan bahwa pengambilan keputusan maupun tanggung jawab berada di tangan komunitas sendiri. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan serta titik sentral pada rakyat atau people centered development approach, merupakan tuntutan pada era globalisasi dan reformasi yang telah dicanangkan oleh masyarakat Indonesia dalam menghadapi krisis kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Untuk mengangkat manusia agar dapat hidup lebih baik, maka negara berkewajiban untuk mensejahterakan kehidupan masyarakatnya. Dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2009-2019 telah diuraikan secara rinci mengenai ekonomi kerakyatan

yang merupakan sistem ekonomi yang hendak dibangun oleh Orde Reformasi sebagai berikut: (1) ciri utama sistem ekonomi kerakyatan adalah penegakkan prinsip keadilan dan demokrasi ekonomi, disertai kepedulian terhadap yang lemah. (2) sejalan dengan yang pertama, pemihakkan, pemberdayaan, dan perlindungan terhadap yang lemah oleh semua potensi bangsa, terutama pemerintah sesuai dengan kemampuan. Pemerintah melaksanakannya melalui langkah-langkah yang mudah dipahami. Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM) termasuk petani dan nelayan kecil, merupakan prioritas utama dalam pengembangan sistem ekonomi kerakyatan, (3) penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat dan intervensi yang ramah pasar. Upaya pemerataan berjalan seiring dengan upaya menciptakan pasar yang kompetitif untuk mencapai efisiensi optimal. (4) pemberdayaan ekonomi rakyat sangat terkait dengan upaya menggerakkan ekonomi pedesaan. Oleh karena itu, upaya mempercepat pembangunan pedesaan termasuk di daerah terpencil, daerah minus, daerah kritis, daerah perbatasan dan daerah terbelakang lainnya harus merupakan prioritas, antara lain, dengan meningkatkan pembangunan prasarana pedesaan dalam mendukung pengembangan keterkaitan desa-kota sebagai bentuk jaringan produksi dan distribusi yang saling menguntungkan. (5) pemanfaatan dan penggunaan tanah dan sumber daya alam lainnya, seperti hutan, laut, air, udara dan mineral secara adil, transparan dan produktif dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. (6) pembangunan ekonomi rakyat, antara lain pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan/pertambakan, pertambangan, industri dan perdagangan barang dan jasa yang berskala mikro dan kecil, merupakan inti dari pembangunan sistem ekonomi kerakyatan.

PNPM Mandiri Pedesaan merupakan proyek pemerintah yang secara substansi berupaya memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga dapat dibangun “gerakan bersama” dalam menanggulangi kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan di wilayah bersangkutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dituntut adanya pembagian peran yang jelas antar pelaku PNPM, baik yang langsung tergabung dalam organisasi proyek maupun pihak-pihak yang terlibat, seperti pemerintah daerah, para pemeduli, kelompok masyarakat, dan lain-lain, dari tingkat pusat sampai dengan tingkat komunitas. Kejelasan tata peran dari pelaku PNPM tersebut sangat penting dalam upaya membangun hubungan kerja yang integral dan komplementer agar tercapai misi utama PNPM, yakni memberdayakan masyarakat dalam menanggulangi masalah kemiskinan, yang didukung oleh pemerintah daerah serta kelompok peduli setempat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, mendorong peneliti untuk mengkaji dan menelaah serta mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat melalui program PNPM Mandiri Pedesaan di Kelurahan Kabongga Besar, peneliti mengambil judul “Evaluasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Di Kelurahan Kabongga Besar Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala ”. Maka yang menjadi pertanyaan pokok dalam kajian ini adalah : *Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan di Kelurahan Kabongga Besar Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala ?* Tujuannya adalah : Untuk mendeskripsikan, menganalisis serta menginterpretasikan evaluasi pelaksanaan Kebijakan PNPM Mandiri Pedesaan di Kelurahan Kabongga Besar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik akademis maupun praktis sebagai berikut : Manfaat akademis:

Sebagai bahan perbandingan untuk melakukan penelitian lanjutan tentang PNPM Mandiri Pedesaan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. Manfaat praktis: Secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan birokrasi pemerintah dan para pelaku (*stake holders*) yang terlibat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan.

Evaluasi Kebijakan

Kebijakan publik adalah keputusan otoritas negara yang bertujuan mengatur kehidupan bersama. Tujuan dari kebijakan publik dapat dibedakan dari sisi sumber daya atau *resources*, yaitu antara kebijakan publik yang bertujuan mendistribusikan sumberdaya negara dan yang bertujuan menyerap sumber daya negara. Pemilahan kedua dari tujuan kebijakan adalah regulatif *versus* deregulatif. Kebijakan regulatif bersifat mengatur dan membatasi, sedangkan kebijakan deregulatif membebaskan.

Evaluasi kebijakan dikatakan sebagai suatu harapan dan kenyataan dan sebagai proses kebijakan publik karena : Sebuah kebijakan publik tidak bisa *dilepas begitu saja*. kebijakan harus *diawasi*, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai “evaluasi kebijakan”. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dengan “kenyataan”.

Menurut Dunn (1999:608), bahwa ada 3 fungsi evaluasi, yaitu:

1. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan, tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai,

2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mengidentifikasi dan mengoprasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepastian tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Dalam menanyakan kepastian tujuan dan sasaran, analisis dapat menguji alternatif sumber nilai (kelompok kepentingan, pegawai negeri, kelompok-kelompok klien), maupun landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalitas (teknis, ekonomis, legal, sosial, dan substantif),
3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan, sebagai contoh dengan menunjukkan bahwa tujuan dan target perlu didefinisi ulang. Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain.

Bisa dikatakan bahwa Evaluasi merupakan cara untuk membuktikan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan dari suatu program, oleh karena itu pengertian evaluasi sering digunakan untuk menunjukkan tahapan siklus pengelolaan program yang mencakup :

- a. Evaluasi pada tahap perencanaan (*EX-ANTE*). Pada tahap perencanaan, evaluasi sering digunakan untuk memilih dan menentukan prioritas dari berbagai alternative dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
- b. Evaluasi pada tahap pelaksanaan (*ON-GOING*). Pada tahap pelaksanaan, evaluasi

digunakan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan program dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

- c. Evaluasi pada tahap Pasca Pelaksanaan (*EX-POST*) pada tahap pasca pelaksanaan evaluasi ini diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini dilakukan setelah program berakhir untuk menilai relevansi (dampak dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dibandingkan keluaran), kemanfaatan (dampak dibandingkan hasil), dan keberlanjutan (dampak dibandingkan dengan hasil dan keluaran) dari suatu program.

Namun dalam perkembangan Ilmu Kebijakan publik, yang sangat populer sebuah model yang dikembangkan oleh William Dunn. Adapun kriteria – kriteria evaluasi kebijakan yang Dunn (1999:610) gambarkan sebagai berikut :

1. Efektifitas, artinya apakah hasil yang diinginkan telah tercapai ?
2. Efisiensi, seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan ?
3. Kecukupan, seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah ?
4. Perataan, apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok – kelompok yang berbeda ?
5. Responsivitas, Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok – kelompok tertentu ?
6. Ketepatan, apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar – benar berguna atau bernilai ?

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.

Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat. Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luarlingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan, strategi yangdikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, sertamengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Sedangkan Tujuan Umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dankesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian ini berusaha untuk

memperoleh pandangan baru tentang suatu gejala atau untuk mendapat gambaran ciri-ciri individu atau kelompok. Sebagai landasan teori dalam memahami pendekatan kualitatif berdasarkan pendapat Bogdan & Taylor dalam Moleong, (2005:41) yang mengartikan dan memahami metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan Silalahi (2009 ; 28) menyatakan bahwa penelitian Deskriptif menyajikan satu gambar yang terperinci tentang suatu situasi, setting sosial, atau hubungan

Dalam penelitian ini menggunakan Teknik Purposive dalam Penentuan Informan, yang terdiri dari : Pegawai Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Donggala, 1 orang , Aparat Kelurahan Kabongga Besar, 1 orang. Pengurus BKM, 1 orang, Fasilitator Desa, 1 orang, Sejumlah Masyarakat Penerima Manfaat PNPM di Kelurahan Kabongga Besar, 2 orang Sehingga informan dalam penelitian ini sebanyak 6 orang.

Dalam penelitian ini jenis data yang dibutuhkan ada 2 macam yaitu data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan. Dan data sekunder yaitu merupakan data pendukung dari data primer yang digunakan untuk kepentingan analisis yang diperoleh dari Kelurahan Kabongga Besar serta melalui penelusuran literatur perpustakaan dan dokumen-dokumen.

Analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (Sugiyono, 2012; 92) dengan prosedur reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 1). Reduksi Data (pengurangan data). Proses reduksi bertujuan menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, mengorganisasi bahan empirik sehingga dapat diperoleh kategori-kategori tematik. 2). Display data (penyajian data). Setelah data disajikan, karena masih ada data yang kurang maka pengumpulan data dilapangan dilakukan kembali sampai data menjadi lengkap. 3).

Menarik kesimpulan/verifikasi. Selanjutnya analisis disusun dan diarahkan pada fokus penelitian untuk disimpulkan dan kesimpulan harus diverifikasi selama penelitian berlangsung agar memudahkan pada kesimpulan akhir.

HASIL & PEMBAHASAN

Kelurahan Kabonga Besar adalah salah satu kelurahan yang berada diwilayah kecamatan Banawa dengan luas wilayah \pm 2.200 Ha yang dihuni oleh 675 KK Dengan Jumlah Penduduk 2.673 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1.379 jiwa dan Perempuan 1.294 jiwa. Dengan diberlakukannya peraturan daerah nomor 13 tahun 2008 tentang Struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Kelurahan, dimana pola struktur organisasi Pemerintah Kelurahan Kabonga Besar terdiri dari Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pembangunan, dan Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial. Adapun Urusan-urusan yang dilaksanakan pada bidang Pemerintahan Adalah:

1. Pelayanan KTP;
2. Pelayanan Kartu Keluarga;
3. Pelayanan Surat Keterangan Domisili;
4. Pelayanan Surat Keterangan Kelakuan Baik;
5. Pelayanan Administrasi bidang Pertanahan;
6. Pelayanan Surat Keterangan Pindah;
7. Pelayanan Surat Keterangan Kelahiran; dan
8. Pelayanan Surat Keterangan Kematian.

Untuk mengetahui penilaian dari informan terhadap Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kabonga Besar Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, peneliti telah melakukan wawancara mendalam terdiri dari 6 aspek, yaitu pertama : Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsive, dan Ketepatan, berdasarkan dengan teori William Dunn(1999:610). Evaluasi Pelaksanaan

Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kabonga Besar Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, dengan melihat 6 aspek evaluasi diatas, dengan melakukan wawancara melibatkan beberapa informan yang dianggap mengetahui dan mengerti masalah – masalah yang diteliti.

Untuk mengetahui apakah Evaluasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kabonga Besar Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala sudah efektif , dapat dilihat bawah ini, yang dikutip dari pendapat informan yang bernama Moh. Ikbal Paliua yang merupakan unsur dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Donggala, mengemukakan bahwa :

“ dalam pantauan pengawasan kami dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Donggala terhadap pelaksanaan PNPM di Kelurahan Kabongga Besar, secara fisik sudah berhasil, yang menjadi kendala adalah secara ekonomi, yang dimana program Simpan Pinjam Perempuan belum mencapai harapan yang diinginkan .” (Wawancara, 10 April 2015)“.

Hasil wawancara tersebut, menggambarkan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Di Kelurahan Kabonga Besar Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala belum efektif, walaupun secara program fisik dilaksanakan dengan baik, namun masih terkendala pada program ekonomi, yaitu program simpan pinjam perempuan yang masih mengalami kemacetan.

Dari wawancara mendalam terhadap 6 informan diatas, yang menilai tentang Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kabonga Besar Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala yang menggunakan model evaluasi William Dunn (1999: 610), didapatkan bahwa pelaksanaannya dari aspek efektifitas belum optimal, adapun

faktor yang mempengaruhinya karena masih ada masalah pengembalian dana Simpan Pinjam Perempuan yang tidak lancar.

Untuk mengetahui apakah Evaluasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kabonga Besar Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala sudah efisien , dapat dilihat bawah ini, yang dikutip dari pendapat informan yang bernama oleh H. Rachmady Ibrahim, sebagai Lurah Kebongga Besar, mengungkapkan bahwa ;

“ sebagai koordinator pelaksana, biaya program PNPM ini sangat bermanfaat kepada masyarakat, berapapun jumlah dananya, akan tetap bermanfaat, ketimbang tidak ada sama sekali. ” (Wawancara, 20 April 2015).

Informasi ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Di Kelurahan Kabonga Besar Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala sudah efisien, berapapun anggaran yang disediakan, akan tetap bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan dasar masyarakat.

Untuk mengetahui apakah Evaluasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kabonga Besar Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala sudah cukup , dapat dilihat bawah ini, yang dikutip dari pendapat informan dari Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Kabongga Besar yang bernama Astul Laski, yang menyebutkan bahwa :

“ manfaat yang dirasakan oleh masyarakat terhadap Program PNPM ini, yang paling mendasar adalah keterlibatan masyarakat dalam menentukan skala pekerjaan yang benar – benar sebuah kebutuhan kami, jadi keterlibatan ini sangat memberikan manfaat , yang juga dirasakan oleh ibu – ibu rumah tangga yang mendapatkan bantuan modal usaha dari program PNPM ini.” (Wawancara, 20 April 2015).

Dari wawancara tersebut, dapat digambarkan bahwa Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Di Kelurahan Kabonga Besar Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala dari aspek manfaat program sudah baik, karena keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah kegiatan di kelurahan Kabonga besar memberikan nilai lebih bagi masyarakat, untuk partisipasi dalam kegiatan PNPM. Untuk ibu – ibu rumah tangga juga merasakan manfaatnya, yaitu adanya bantuan modal usaha yang bisa dikembalikan dengan secara angsuran.

Dari wawancara mendalam terhadap 6 informan diatas, yang menilai tentang Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kabonga Besar Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala yang menggunakan model evaluasi William Dun (1999: 610), didapatkan bahwa pelaksanannya dari aspek efisiensi sudah baik, adapun faktor yang mempengaruhinya karena dana yang dikucurkan bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin buat kebutuhan masyarakat. Untuk mengetahui apakah Evaluasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kabonga Besar Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala dari aspek Kecukupan sudah baik, dapat dilihat bawah ini, yang dikutip dari Fasilitator Kelurahan yang bernama Minarti, yang menyebutkan bahwa :
“ dalam pendampingan kegiatan PNPM di Kelurahan Kabonga Besar, kami selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat, agar program yang akan diusulkan benar – benar memiliki manfaat yang bisa dirasakan oleh semua masyarakat.” (Wawancara, 20 April 2015)

Hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Di Kelurahan Kabonga Besar Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala dari aspek penyebaran program sudah baik, karena

program yang dilaksanakan dalam PNPM telah disaring oleh semua elemen pelaksana, yaitu program yang benar – benar bisa membawakan manfaat semua lapisan masyarakat.

Dari wawancara mendalam terhadap 6 informan diatas, yang menilai tentang Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kabonga Besar Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala yang menggunakan model evaluasi William Dun (1999: 610), didapatkan bahwa pelaksanannya dari aspek kecukupan sudah baik, adapun faktor yang mempengaruhinya karena program memberikan manfaat bagi masyarakat kelurahan. Untuk mengetahui apakah Evaluasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kabonga Besar Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala dari aspek responsive sudah baik, dapat dilihat bawah ini, yang dikutip dari Asnani selaku penerima manfaat PNPM, yang mengungkapkan :

“ sebagai penerima bantuan Simpan Pinjam Perempuan, saya merasa sangat puas bisa terbantuan oleh program yang dilakukan oleh PNPM, karena jika kami mesti meminjam ke Bank, kami tidak punya jaminan yang bisa kami serahkan.” (Wawancara, 20 April 2015)

Hal ini menunjukkan, bahwa Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Di Kelurahan Kabonga Besar Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala dari aspek kepuasan penerima program sudah baik, khususnya bagi perempuan yang menggunakan modal usaha dari program Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Dari wawancara mendalam terhadap 6 informan diatas, yang menilai tentang Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kabonga Besar Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala yang

menggunakan model evaluasi William Dun (1999: 610), didapatkan bahwa pelaksanaannya dari aspek responsivitas sudah baik, adapun faktor yang mempengaruhinya karena para penerima manfaat puas dengan keberadaan program.

Untuk mengetahui apakah Evaluasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kabonga Besar Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala dari aspek ketepatan sudah baik, dapat dilihat bawah ini, yang dikutip dari Telma selaku masyarakat penerima manfaat PNPM, yang mengungkapkan:

“ kami masyarakat di Kelurahan mestinya banyak mendapat perhatian dari pemerintah, jangan hanya orang – orang kaya yang mendapatkan dana, kami juga mau hidup lebih layak lagi. Program PNPM sedikit banyak sudah berguna bagi kami untuk bisa melakukan usaha dirumah.” (Wawancara, 20 April 2015)

Hal ini menunjukkan, bahwa Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Di Kelurahan Kabonga Besar Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala dari aspek kegunaan program sudah baik, karena masyarakat penerima manfaat terbantuan dengan adanya program PNPM khususnya bantuan permodalan usaha bagi ibu rumah tangga mereka. Dari wawancara mendalam terhadap 6 informan diatas, yang menilai tentang Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kabonga Besar Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala yang menggunakan model evaluasi William Dun (1999: 610), didapatkan bahwa pelaksanaannya dari aspek ketepatan sudah baik, adapun faktor yang mempengaruhinya karena penerima manfaat menilai bahwa program berguna bagi mereka.

KESIMPULAN & REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap fokus permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, bahwa: *Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan di Kelurahan Kabonga Besar Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala belum optimal*, hal ini dinilai dari 6 aspek kajian dalam penelitian ini, yaitu 1) daspek efektifitas belum optimal, karena masih ada masalah pengembalian dana Simpan Pinjam Perempuan yang tidak lancar, 2) aspek efisiensi sudah baik, karena dana yang dikucurkan bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin buat kebutuhan masyarakat, 3) aspek kecukupan sudah baik, karena program memberikan manfaat bagi masyarakat kelurahan, 4) dari aspek perataan sudah baik, karena program menyebar kesemua lapisan masyarakat, 5) aspek responsivitas sudah baik, dimana para penerima manfaat puas dengan keberadaan program, 6) dari ketepatan sudah baik, karena penerima manfaat menilai bahwa program berguna bagi mereka.

Oleh karena itu penelitian ini menyarankan untuk diperhatikan yaitu Saran Teoritis yaitu perlunya penelitian lanjutan tentang evaluasi kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang jangkauannya lebih luas, dan perlunya kajian yang lebih mendalam tentang dimensi – dimensi evaluasi kebijakan dalam menghasilkan penelitian yang lebih menyeluruh. Saran Praktis yaitu perlunya pendampingan manajemen usaha bagi kelompok yang menerima bantuan dana bergulir dalam kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), agar tidak terjadi lagi kemacetan pengembalian dana bergulir.

UCAPAN TERIMA KASIH

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Slamet Riadi, M.Si dan Dr. Moh. Khairil, M.Si atas segala bimbingan, koreksi dan motivasinya sehingga bisa menyelesaikan artikel ini. Tak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada unsur pimpinan Program Pascasarjana Universitas Tadulako yang memberikan kesempatan menempuh pendidikan, serta rekan – rekan mahasiswa yang terus mendorong penulis dalam penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

Dunn, William N, 1999, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Petunjuk Teknis. 2013. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Kemendagri. Jakarta.

Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2009-2014. Kementerian Bappenas. Jakarta

Silalahi. Uber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*, Rafika Aditama. Bandung.

Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alpha Beta. Bandung.

_____, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alpha Beta. Bandung.

Wahab, S.A. 1997. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Bumi Aksara. Jakarta.